

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota Malang

Findy Rizky Amelia, Wiwin Priana



Findy Rizky Amelia¹, Wiwin Priana²; ^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya, 60294, Jawa Timur.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2023-21-11

Received in revised form 2023-12-12

Accepted 2024-04-01

Kata kunci:

Kemiskinan, Inflasi, Pengangguran, Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi.

Keywords:

Poverty, Inflation, Unemployment, Education, Economic Growth.

How to cite item:

Findy Rizky Amelia, Wiwin Priana. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota Malang. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 5(1).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi, pengangguran, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kota Malang. Pendekatan yang digunakan menggunakan model kuantitatif dengan data tingkat kemiskinan, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2021. Hasil penelitian menginterpretasikan bahwa dari empat variabel independen tersebut, hanya tingkat pengangguran yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel kemiskinan. Sedangkan variabel inflasi, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, dan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini menekankan pentingnya pengurangan tingkat pengangguran sebagai kebijakan prioritas dalam mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan, terutama daerah perkotaan seperti Kota Malang.

The aim of this research is to find out how these factors influence poverty. The approach method used in this research uses a quantitative approach. The data used in this research are poverty levels, inflation, TPT, government expenditure in education and economic growth in Malang City in 2010-2021. The research results interpret that of the 4 independent variables, only the Open Unemployment Rate has a significant positive influence on the poverty variable, while the Inflation variable, the Government Expenditure Variable in the Education Sector, and the Economic Growth Variable have a positive and insignificant influence on the Poverty Variable.

* Findy Rizky Amelia, Wiwin Priana.

© 2024 University of Merdeka Malang All rights reserved.

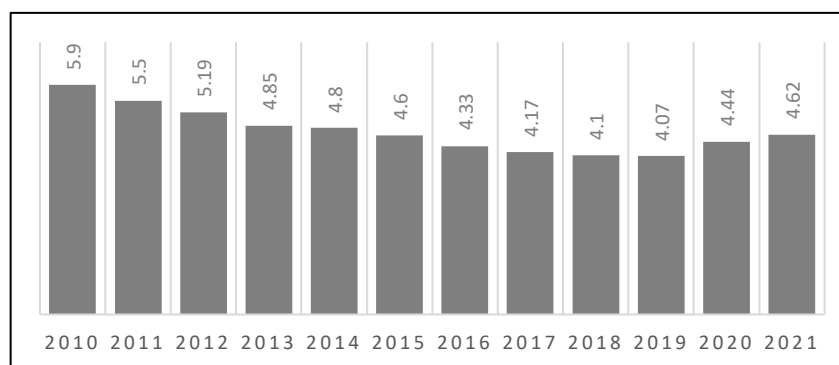
Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

1. Pendahuluan

Salah satu tujuan utama pembangunan nasional adalah mengoptimalkan kinerja ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan (Agustina, 2020). Salah satu strategi penting dalam kerangka pembangunan ini adalah pengurangan angka kemiskinan, mengingat kemiskinan merupakan indikator sosial yang signifikan dan multifaset dalam proses pembangunan (Asnidar, 2018; Bukit, 2019). Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan saling terkait dengan tingkat pengangguran serta ketimpangan sosial, yang secara bersamaan menciptakan tantangan yang signifikan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas.

Kota Malang adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang orientasi kebijakannya untuk mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem. Kondisi kemiskinan di Kota Malang selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Namun demikian, indeks kedalaman kemiskinannya justru meningkat, mengindikasikan bahwa penduduk miskin mengalami penurunan daya beli yang semakin signifikan. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya perlu fokus pada pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi juga harus memperhatikan upaya untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Menurut Derek *et al.*, (2023), pengurangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta pengembangan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 01. Indeks Kemiskinan Kota Malang



Sumber: BPS Kota Malang, diolah

Kemiskinan pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk inflasi dan pengangguran. Inflasi yang merujuk pada kenaikan harga barang dan jasa secara berkelanjutan, dapat mengurangi daya beli masyarakat dan memperburuk kondisi kemiskinan (Sari & Supadmi, 2016). Di sisi lain, tingkat pengangguran yang tinggi mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat dan meningkatkan risiko kemiskinan (Bilkisty, 2017; Sarkoro & Zulfikar, 2018). Oleh karena itu, kebijakan yang efektif dalam mengendalikan inflasi dan mengurangi pengangguran diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Kasus di Kota Malang, inflasi yang terus meningkat dan tingkat pengangguran yang cenderung tinggi telah menyebabkan krisis ekonomi yang mempengaruhi stabilitas ekonomi lokal. Tingkat inflasi yang naik menimbulkan ketidakpastian harga barang dan jasa, sementara tingkat pengangguran yang tinggi menandakan kurangnya peluang kerja bagi masyarakat. Dampak dari kedua persoalan ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Pangesti & Susanto, 2018). Namun di Kota Malang, presentase pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan mengalami penurunan karena keterbatasan anggaran daerah. Kondisi ini berdampak negatif pada upaya perbaikan kualitas pendidikan dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang perlu meningkatkan alokasi anggaran di bidang pendidikan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Langkah ini merujuk pada pendapat Safuridar (2017) dan Sari (2017), yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Terdapat ragam faktor-faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kota Malang, terutama kemiskinan, inflasi, tingkat pengangguran, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut melengkapi dari penelitian sejenis yang dikemukakan oleh Latifa *et al.*, (2017), Prasetyoningrum (2018), Soekapdjo & Oktavia (2021), Susanto & Pangesti (2021), bahwa keempat variabel relatif berperan terhadap laju kemiskinan di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut

terhadap kemiskinan khususnya di Kota Malang. Tujuan penelitian diperlukan untuk memperkuat argumentasi secara teoritis apakah faktor-faktor yang dimaksud memang berpengaruh, sehingga dapat dirancang model kebijakan yang tepat sasaran.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena yang rumit, melibatkan berbagai aspek termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Secara umum, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi individu atau kelompok yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini mencakup kekurangan dalam pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang terjangkau, perumahan yang layak, dan pekerjaan yang stabil.

Kemiskinan juga sering dikaitkan dengan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, serta dengan masalah sosial seperti marginalisasi dan diskriminasi. Di tingkat global, kemiskinan menjadi fokus utama karena dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan manusia dan stabilitas sosial. Salah-satu faktor yang memengaruhi kemiskinan adalah kurangnya akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja yang terbatas. Selain itu, ketimpangan ekonomi dan sosial juga dianggap sebagai kontributor utama terhadap tingginya tingkat kemiskinan di berbagai negara. Studi oleh Cica Zartika (2016) menyoroti dampak perubahan struktural dalam perekonomian global, yang sering kali meningkatkan kesenjangan ekonomi dan memperburuk kondisi kemiskinan. Dengan memahami faktor-faktor penyebab ini, para peneliti dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi kemiskinan.

3. Inflasi

Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Terdapat tiga kriteria yang perlu diamati untuk melihat telah terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan terjadi terus menerus dalam rentang waktu tertentu. Apabila terjadi kenaikan harga satu barang, yang tidak mempengaruhi harga barang lain, sehingga tidak naik secara umum,

kejadian tersebut tidak dikategorikan sebagai inflasi. Kecuali bila yang naik adalah harga kebutuhan pokok seperti BBM, yang berpengaruh terhadap harga-harga lain sehingga secara umum semua produk hampir mengalami kenaikan harga. Bila kenaikan harga itu terjadinya sesaat kemudian mengalami penurunan, hal tersebut juga belum bisa dikatakan inflasi, karena kenaikan harga yang diperhitungkan dalam konteks inflasi mempunyai rentang waktu minimal satu bulan (Soekapdjo & Oktavia, 2021).

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut konsep ILO (*International Labor Organization*), tingkat pengangguran terbuka mencakup penduduk yang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi dan daerah yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar hidup dan tekanan psikologis (Khumairoh *et al.*, 2018).

5. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan merujuk pada alokasi dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk pengeluaran yang terkait dengan pembangunan dalam 18 sektor yang melibatkan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan (Rahardja & Manurung, 2004). Sesuai dengan Konstitusi UUD 1945 pasal 31 ayat 1-4 tentang pendidikan, ayat (1) menegaskan hak setiap warga negara untuk menerima pendidikan, ayat (2) mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar yang akan dibiayai oleh pemerintah, ayat (3) menekankan peran pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan iman, taqwa, dan akhlak mulia, dan ayat (4) menetapkan prioritas anggaran pendidikan sebesar setidaknya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memastikan

penyelenggaraan pendidikan nasional.

Ayat 1, 2, dan 4 menunjukkan tanggung jawab besar pemerintah dalam mengelola pendidikan melalui alokasi dana dari APBN dan APBD sebesar minimal 20 persen. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mencerminkan jumlah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dari anggaran total untuk pembangunan yang diarahkan kepada sektor pendidikan, termasuk untuk fasilitas pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program wajib belajar 12 tahun, dan aspek lain yang mendukung pendidikan. Hal ini menggarisbawahi peran penting pemerintah dalam memastikan perkembangan pendidikan yang mempengaruhi kemajuan bangsa.

6. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan alat penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam menguji hipotesis yang telah ditentukan (Ghozali, 2018). Lokasi penelitian dilakukan di Kota Malang. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data yang diperlukan hingga tahap penulisan. Rentang waktu penelitian mencakup periode 12 tahun, dimulai dari tahun 2010 hingga 2021. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi linier berganda, yang ditujukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model ini menunjukkan hubungan spesifik antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

7. Hasil Pembahasan

a. Asumsi Klasik

Fadul (2019) menjelaskan bahwa uji asumsi klasik merupakan langkah yang penting sebelum melakukan analisis lebih lanjut dalam pengujian hipotesis. Tujuan dari pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Dengan melakukan uji asumsi klasik secara teliti, diharapkan hasil analisis regresi dapat menjadi lebih valid dan dapat diandalkan. Dalam uji tersebut terdapat beberapa tahap uji yaitu, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, dan Uji

Heteroskedastisitas.

a) Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, dapat diketahui bahwa dari ketiga variabel pada pengujian nilai Kemiskinan di Kota Malang, bahwa nilai output yang dihasilkan variabel independen memiliki nilai kurang dari (\leq) 10 pada nilai sig. α 0,05. Artinya dapat ditarik kesimpulan, bahwa tidak terjadi gejala muktikolinieritas pada model regresi.

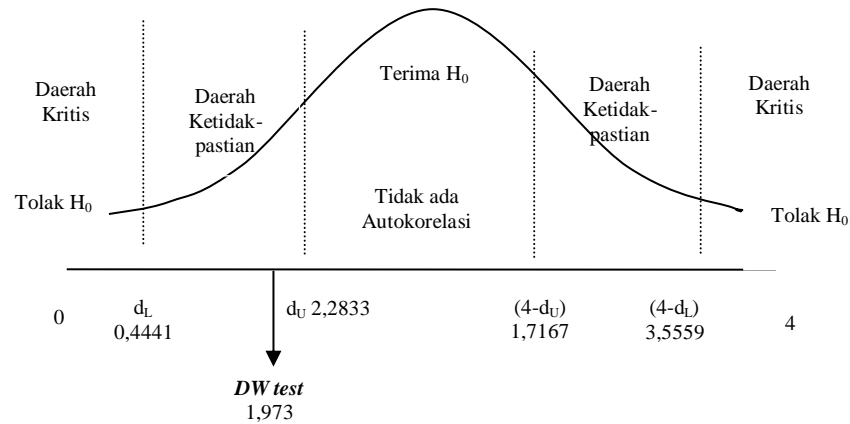
Tabel 01. Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.588	1.225		2.930	.022		
Inflasi	.034	.046	.137	.728	.490	.486	2.056
TPT	.291	.074	.638	3.950	.006	.663	1.508
Pengeluaran Pendidikan	-1.103E-005	.000	-.563	-2.514	.040	.345	2.895
Pertumbuhan Ekonomi	.031	.049	.130	.639	.543	.416	2.402

Sumber : Data Diolah (2024)

b) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah korelasi antara anggota dari serangkaian pengamatan yang diurutkan dalam waktu (*data time series*) atau secara spasial (*data cross section*). Dalam model regresi linier klasik, diasumsikan bahwa autokorelasi tersebut tidak muncul dalam gangguan atau gangguan yang terkait dengan deteksi yang diamati dari autokorelasi. Kasus tersebut dalam penelitian ini dilakukan melalui Uji Durbin Watson. Berdasarkan hasil perhitungan Durbin-Watson, posisi nilai DW *test* sebesar 2,171 berada diantara $(4-d_u)$ dan $(4-d_l)$ nilai ini lebih besar dari 0. Dapat diartikan bahwa pada model uji ini tidak terjadi gejala autokorelasi dikarenakan nilai DW *test* berada di daerah ketidakpastian.

Gambar 02. Kurva Statistik Durbin-Watson

Sumber : Data Diolah (2024)

c) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Lupiyoadi (2015), heteroskedastisitas berarti variasi residual tidak sama dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain, sehingga variasi residual harus bersifat homoskedastisitas, yaitu pengamatan satu dengan pengamatan yang lain sama agar memberikan pendugaan model yang lebih akurat. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh tingkat signifikan koefisien Glejser untuk variabel Kemiskinan di Kota Malang memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Artinya, pada pengujian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

Tabel 02. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.470	.546		.861	.418
Inflasi	-.017	.021	-.367	-.839	.429
TPT	-.009	.033	-.108	-.288	.782
Pengeluaran Pendidikan	-1.831E-006	.000	-.486	-.937	.380
Pertumbuhan Ekonomi	.016	.022	.336	.711	.500

Sumber : Data Diolah (2024)

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis linier berganda, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$KMKS_N = 1,225 + 0,046 \text{ INFLASI} + 0,074 \text{ TPT} + 0,000 \text{ PENGELUARANPENDIDIKAN} + 0,049 \text{ PRTMBH.EK} + e$$

Dari persamaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Konstanta (β_0) : $Y = 1,225$, menunjukkan bahwa apabila inflasi (X_1), TPT (X_2), pengeluaran pendidikan (X_3), pertumbuhan ekonomi (X_4) terhadap Kemiskinan (Y) sebesar 1,225 persen.
- b) Koefisien regresi X_1 (β_1) : $Y = 0,000$, menunjukkan bahwa inflasi (X_1) berpengaruh positif dapat diartikan apabila inflasi mengalami peningkatan 1% maka kemiskinan (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,046%. Dengan asumsi X_2 , X_3 , dan X_4 konstan.
- c) Koefisien regresi X_2 (β_2) : $Y = 0,074$, menunjukkan bahwa TPT (X_2) berpengaruh positif, dapat diartikan apabila TPT mengalami peningkatan sebesar 1% maka Kemiskinan (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,074%. Dengan asumsi X_1 , X_3 , dan X_4 konstan.
- d) Koefisien regresi X_3 (β_3) : $Y = 0,000$, menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan (X_3) berpengaruh secara positif, dapat diartikan apabila pengeluaran pendidikan mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah maka kemiskinan (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,000%. Dengan asumsi X_1 , X_2 , dan X_4 konstan.
- e) Koefisien regresi X_4 (β_4) : $Y = 0,049$, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X_4) berpengaruh positif dapat diartikan apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1%, maka kemiskinan (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,049%. Dengan asumsi X_1 , X_2 , dan X_3 konstan.

c. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui variabel inflasi, TPT, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Tingkat signifikan yang digunakan adalah α sebesar 5%. Kriteria pengujian adalah apabila nilai t hitung $>$ tabel atau probabilitas nilai $t < \alpha = 0.05$, berarti secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila nilai t hitung $>$ t tabel atau probabilitas nilai $t > \alpha = 0.05$, maka secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya untuk melihat ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel terikatnya, dapat dianalisa melalui uji t dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 03. Hasil Analisis Pengaruh Inflasi, TPT, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig.
Inflasi (X ₁)	0,728	2,200	0,490
TPT (X ₂)	3,950	2,200	0,006
Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X ₃)	-2,514	2,200	0,040
Pertumbuhan Ekonomi (X ₄)	0,639	2,200	0,543
Variabel terikat : Kemiskinan			

Sumber : Data Diolah (2024)

- a) Pengaruh Secara Parsial antara Inflasi terhadap Kemiskinan
Berdasarkan Uji t, dapat dilihat bahwa nilai t-hitung sebesar 0,728 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,200 serta nilai probabilitas menunjukkan $0,490 > 0,05$. Dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel inflasi (X₁) terhadap variabel kemiskinan (Y) di Kota Malang.
- b) Pengaruh Secara Parsial Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan
Berdasarkan Uji t, dapat dilihat bahwa nilai t-hitung sebesar 3,950 lebih besar dari nilai t-tabel 2,200, serta nilai probabilitas menunjukkan $0,006 < 0,05$. Dapat diartikan bahwa tingkat pengangguran terbuka (X₂) memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y) di Kota Malang.
- c) Pengaruh Secara Parsial antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Kemiskinan
Berdasarkan Uji t, dapat dilihat bahwa nilai t-hitung sebesar -2,514 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,200, serta nilai probabilitas menunjukkan $0,040 < 0,05$. Dapat diartikan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X₃) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kemiskinan (Y) di Kota Malang.
- d) Pengaruh Secara Parsial antara Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan
Berdasarkan Uji t, dapat dilihat bahwa nilai t-hitung sebesar 0,639 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,200, serta nilai probabilitas menunjukkan $0,543 < 0,05$. Dapat diartikan bahwa pertumbuhan

ekonomi (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan (Y) di Kota Malang.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Malang, sedangkan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh signifikan.

d. Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan

Variabel inflasi menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Malang selama periode 2010 hingga 2021. Temuan ini sejalan dengan penelitian Susanto & Pangesti (2021), yang mengindikasikan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena nilai t hitung yang lebih kecil daripada t tabel. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui kebijakan pemerintah yang proaktif dalam memberikan subsidi atau bantuan langsung seperti sembako dan bantuan tunai, yang secara efektif meredam dampak inflasi terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM). Selain itu, keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi membuktikan bahwa pemerintah mampu menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat tetap stabil, meskipun terjadi peningkatan inflasi. Pengendalian jumlah uang yang beredar juga berkontribusi pada tidak signifikkannya pengaruh inflasi terhadap kemiskinan.

e. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan

Variabel TPT memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan di Kota Malang dalam kurun waktu 2010 hingga 2021. Hasil ini konsisten dengan penelitian Derek, *et al.*, (2023) yang menemukan bahwa TPT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Di Kota Malang, peningkatan TPT berbanding lurus dengan peningkatan kemiskinan, karena pengangguran berdampak langsung pada ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar akibat ketiadaan pendapatan yang stabil. Kondisi ini diperparah oleh tingginya ketergantungan pada pekerjaan informal dan sektor pertanian yang kurang stabil. Pengangguran menciptakan siklus kemiskinan yang

sulit diputus, dimana kurangnya pendapatan mengurangi akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya memperburuk tingkat kemiskinan (Haqiqi & Widwi, 2021).

f. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan terhadap Kemiskinan

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Malang selama periode 2010 hingga 2021. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aini (2020), yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Di Kota Malang, penurunan anggaran pendidikan hingga 7% pada tahun 2016 mengakibatkan dampak yang tidak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Meskipun sebagai kota pendidikan, Malang seharusnya memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, alokasi anggaran yang menurun menghambat efektivitas program pendidikan dalam mengurangi kemiskinan. Peningkatan anggaran di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, yang gilirannya dapat memperbaiki peluang kerja dan mengurangi kemiskinan.

g. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Malang dalam kurun waktu 2010 hingga 2021. Temuan ini konsisten dengan penelitian Latiffa, *et al.*, (2017) dan Aini (2020), yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Manado tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Di Kota Malang, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak cukup signifikan untuk mengurangi kemiskinan, disebabkan oleh stabilitas sektor-sektor pekerjaan utama seperti industri yang tidak menunjukkan peningkatan signifikan sebelum pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi cenderung tidak inklusif dan tidak menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk mengakomodasi angkatan kerja baru. Oleh karena itu, meski ada pertumbuhan ekonomi, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan tetap minimal, karena sektor-sektor dominan tidak cukup dinamis dalam menciptakan lapangan

kerja baru dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Untuk mengatasi kemiskinan secara efektif di Kota Malang, diperlukan strategi yang komprehensif dan holistik, mencakup peningkatan lapangan kerja melalui diversifikasi ekonomi, pengendalian inflasi yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas serta akses pendidikan. Pendekatan multidimensional ini akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi secara kuantitatif tetapi juga secara kualitatif, dengan memperbaiki distribusi pendapatan dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

8. Penutup

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting. *Pertama*, variabel inflasi di Kota Malang memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pengaruh ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat, sehingga dampak inflasi terhadap kemiskinan dapat diminimalkan. *Kedua*, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Persoalan pengangguran mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar karena tidak adanya pendapatan. *Ketiga*, variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Malang. Penurunan anggaran pendidikan menyebabkan pengeluaran di sektor ini tidak cukup untuk secara signifikan mengurangi kemiskinan. *Keempat*, variabel pertumbuhan ekonomi di Kota Malang menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, dimana keuntungan pertumbuhan cenderung dinikmati oleh golongan berpendapatan menengah ke atas, sementara golongan masyarakat berpendapatan rendah tidak merasakan manfaatnya.

Berdasarkan temuan, beberapa saran dapat diusulkan untuk pemerintah Kota Malang. *Pertama*, keberhasilan dalam mengendalikan laju inflasi perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Selain pengendalian inflasi, pemerintah juga harus fokus pada penurunan tingkat kemiskinan dengan memperkuat kebijakan subsidi dan bantuan sosial. *Kedua*,

pemerintah harus menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk menekan laju TPT. Dengan semakin banyak masyarakat yang bekerja, angka kemiskinan dapat berkurang secara signifikan. *Ketiga*, sektor pendidikan harus mendapatkan perhatian khusus, mengingat pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan generasi yang akan datang. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan untuk memperbaiki kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kota Malang. *Keempat*, untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, pemerintah harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Fokus pada pemerataan pertumbuhan ekonomi akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Dengan implementasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan tingkat kemiskinan dapat ditekan secara signifikan, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Daftar Pustaka

- Agustina, D. 2020. Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sains dan Matematika Unpam*, Vo. 3, No. 1, pp. 81.
- Aini, R. 2020. Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro*, Vol. 8, No. 2, pp. 50-75.
- Asnidar. 2018. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 2, No. 5, pp. 12.
- Bilkisty, R. A. 2017. *Pengaruh Intensitas Persaingan Pasar Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Sebagai Pemoderasi*. Disertasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung, pp. 63-99.
- Bukit, M., A. 2019. *Analisis Peranan Sektor-Sektor Ekonomi Terhadap Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Karo*. Available at: <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14034>.
- Sari, C. Y., & Supadmi, N. 2016. Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal pada peningkatan indeks pembangunan manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 15, No. 3, pp. 2409-2438.
- Derek, T. M., Lopian, A. L. C. P. & Tumangkeng, S. Y. L. 2023. Pengaruh pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi

- Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 23, No. 9, pp. 49–60.
- Haqiqi, N. & Widwi, H. A. 2021. Pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen di perkebunan sayuran andritani farm Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 5, No. 3, pp. 717–729.
- Khumairoh, N. S.. 2018. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia 2007-2016. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, pp. 105.
- Latiffa, N., Rotinsulu, D., & Tumilaar, R. 2017. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka dan dampaknya pada jumlah penduduk miskin. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 17, No. 02, pp. 106–117.
- Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. S. 2019. Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia. *Ecoplan : Journal of Economics and Development Studies*, Vol. 2, No. 2, pp. 77–89.
- Pangesti, I., & Susanto, R. 2018. Pengaruh Inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, Vol. 5, No. 1, pp. 70.
- Prasetyoningrum, A. K. 2018. Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (ipm), pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, pp. 217.
- Safuridar, S. 2017. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, pp. 37–55.
- Sari, P. 2017. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Accounting Global Journal*, Vol. 1, No. 1, pp. 1745–1773.
- Sarkoro, H., & Zulfikar, Z. 2018. Dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia (studi empiris pada pemerintah provinsi se-Indonesia tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, pp. 54–63.
- Soekapdjo, S., & Oktavia, M. R. 2021. Pengaruh inflasi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, pp. 94–102.
- Susanto, R., & Pangesti, I. 2021. Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, Vol. 7, No. 2, pp. 271.